

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.

Amirudin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publisng,
Yogyakarta, 2001.

Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai*

Beni, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era*

Bungin, B.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007

Feri Amsari, *Pembauran Partai Politik di Indonesia Demokrasi Internal Partai
Politik*, Alumni, Bandung, 2009.

Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Hubaidi, *Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah*.Genta Publishing,.Jogjakarta,
2001.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.

Lili Romli *Pemilu era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Parta Politik*,
Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003.

Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik*. Salemba
Empat, Jakarta, 2016.

Otonomi. Taushia, Jakarta, 2016.

P.A.F.Lamintang, *Pengantar Pemilihan Umum Di Indonesia*, Sinar Grafika,
Jakarta, 2002.

Permasalahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ridwan, *I'tikad Baik dalam Kontrak di berbagai sistem Hukum*, Ridwan Khairandy, UII Pers, Jakarta, 2002.

Rusdianto. *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Grasindo. Jakarta, 2006.

Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.

Soeyatno, *Komisi Pemilihan Umum*, UII Press, Jakarta, 2001.

Sutedi, A, *Pengadaan Barang dan Jasa*. Ghalia Indonesia. Bogor, 2012.

Wibawa, S. *Kebijakan publik. Intermedia. Jakarta. Willem, S. 2012. Manajemen Pengadaab Procurement Management*. Alfabeta. Bandung, 2001

Winarno. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020

C. Sumber Lainnya

Anriani, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Takalar*, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Theresia tarigan, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Pengadaan Barang/Jasa Antara Kpu Kab.TobaSamosir Dengan Cv.Oppung Naburju*, universitas sumatera utara medan

